

Peningkatan Jalan Mentewe Tanbu Kalsel Cukup Baik



Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Hormansyah (tengah) bersama temannya H Agus Mawardi berfoto saat memantau hasil peningkatan jalan provinsi di wilayah Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), beberapa waktu lalu. { antara }

Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Hormansyah berpendapat, peningkatan jalan provinsi yang berada di wilayah Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) hasilnya cukup baik. Pendapat anggota DPRD Kalsel dua periode itu di Banjarmasin, Selasa sesudah kunjungan kerja (Kunker) ke “Bumi Bersujud” Tanbu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotabaru di paling timur provinsi tersebut, 11 – 12 Oktober 2020.

Jalan provinsi yang mengalami peningkatan menggunakan APBD Kalsel itu tepatnya Jalan Goa Liang Bangkai dengan nilai kontrak Rp4.687.874.176. LPA panjang 1,445 kilometer (km), lebar enam meter dari tebal 20 Cm, kemudian LPS kiri & kanan panjang 1,445 km, lebar 1,5 meter serta tebal 25 Cm.

Hasil peningkatan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel. Foto staf Komisi III DPRD Kalsel 11 Oktober 2020. (Istimewa/Nanda staf Komisi III DPRD Kalsel) Aspal panjang:1,445 km, lebar enam meter dan tebal lima Cm, lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergelar sarjana hukum, sarjana agama dan magister hukum itu. Selain itu, peningkatan Jalan dan Jembatan Buluh Rejo – Rejo Sari dengan nilai kontrak Rp9.161.878.749. Kiri panjang 2,595 km, lebar LPA 1,5 meter, LPS 1,5 meter, tebal LPA 30 Cm, LPS 38 Cm.

Kemudian kanan panjang penangan LPA 2,145 km, LPS 2,595 km, lebar LPA 1,5 meter, LPS 1,5 meter, tebal LPA 30 Cm, LPS 38 Cm. Aspal HRS-WC panjang 2,595 km, lebar enam meter, tebal tiga Cm. HRS-Base panjang 2,595 km, lebar enam meter, tebal enam Cm, demikian Hormansyah. Jalan provinsi di Bumi Bersujud Tanbu yang merupakan wilayah timur Kalsel itu menghubungkan dengan “Banua Anam” provinsi tersebut melalui Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Hasil peningkatan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel.

Tampak H Agus Mawardi – anggota Komisi III DPRD Kalsel sedang meninjau jalan tersebut, 11 Oktober 2020. (Istimewa/Nanda staf Komisi III DPRD Kalsel) di Banua Anam Kalsel itu terdiri 13 Kabupaten Tapin, HSS, Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong. Bagi mereka dari Banua Anam mau ke Batulicin (260 kilometer timur Banjarmasin), ibu kota Tanbu atau ingin ke Kotabaru (300 kilometer timur Banjarmasin) bisa memperpendek jarak/jalanan lewat Lumpangi HSS.

Sebelum ada jalan Kandangan (135 kilometer utara Banjarmasin), ibu kota HSS – Lumpangi – Batulicin tersebut, warga masyarakat Banua Anam yang ke wilayah timur Kalsel harus lewat Banjarbaru yang memakan waktu perjalanan dengan naik mobil berkisar enam – tujuh jam. Tetapi dengan lewat Kandangan – Lumpangi – Batulicin lama tempuh pakai mobil cuma sekitar empat jam atau dapat menghemat waktu lebih kurang dua jam serta bahan bakar minyak.

Sumber Berita:

1. <https://www.metrokalimantan.com>, Legislator : Peningkatan jalan mentewe Tanbu Kalsel cukup baik, Selasa, 13 Oktober 2020.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, Peningkatan jalan mentewe Tanbu Kalsel cukup baik, Kamis, 15 Oktober 2020.

Catatan:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan

negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.

- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembagalembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
- Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.